

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam era otonomi daerah yang sedang berjalan dewasa ini di Indonesia, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menjalankan pemerintahannya secara mandiri. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas harus dilaksanakan atas dasar prinsip - prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi - potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dinyatakan wewenang pemerintah pusat diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi yang harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya sesuai dengan kewenangan yang diserahkan.

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung subsidi dari pusat (Isroy, 2013). Dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber - sumber keuangan di daerahnya. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah berdasarkan potensi yang dimiliki (<http://keuda.kemendagri.go.id>).

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar pelaksanaan otonomi kepada daerah yang didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan dan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Penyelenggaran desentralisasi memerlukan sumber pendanaan yang besar. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber - sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Sesuai pasal 285 UU No. 23 tahun 2014, sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain - lain pendapatan daerah yang sah. Penyerahan urusan dan pemberian sumber pendanaan pada daerah otonom, pada hakekatnya ditujukan untuk memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menyikapi aspirasi masyarakat dan prioritas daerah guna mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat di daerah, serta secara lebih luas diharapkan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah.

Aryanti (dalam Paramitha, 2014) pemerintah perlu mengidentifikasi dan menganalisis sektor potensial yang dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan di daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu cara untuk mengukur kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan memperhatikan besarnya jumlah PAD yang dapat diperoleh oleh suatu daerah. Menurut Mardiasmo (2011), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Kuncoro (1995) dalam penyelenggaraan otonomi daerah dikhawatirkan banyak daerah Kabupaten / Kota yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini dimana porsi antara Pendapatan Asli Daerah dengan bantuan pusat sangat menjolok sekali bahwa lebih separuh dari jumlah Kabupaten / Kota di Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah yang sangat minim dalam membiayai kebutuhan anggaran daerahnya, yaitu di bawah 15 % dari total anggaran secara keseluruhan. Rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah di setiap daerah, tentu akan berimplikasi pada rendahnya pembiayaan melalui anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing - masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapat asli daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi sumber daya

dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber - sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya (Halim, 2004).

Peran serta penduduk dalam peningkatan perekonomian merupakan sesuatu yang harus karena penduduk merupakan komponen penggerak dari setiap sektor perekonomian. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan, dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Mankiw (2006) menjelaskan bahwa, apabila kemajuan teknologi terjadi lebih cepat pada daerah dengan banyak jumlah penduduk sehingga ada lebih banyak temuan, maka daerah dengan banyak jumlah penduduk akan peningkatan pendapatan di dalam pemerintah daerah atau perkembangan yang lebih cepat. Besarnya pendapatan asli daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik juga akan meningkat (Simanjuntak, 2001).

Menurut Todaro (1997) faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari suatu negara atau masyarakat yaitu pertumbuhan penduduk dan hal - hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, artinya semakin banyak angkatan kerja berarti semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Namun demikian kesemuanya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian untuk menyerap dan mempekerjakan tambahan pekerja itu secara produktif. Adapun hukum Wagner (dalam

Mangkoesobroto, 2010) mengutarakan bahwa, dalam suatu perekonomian di dalam masyarakat, apabila jumlah pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat karena disebabkan adanya penerimaan pendapatan yang melalui pajak dan retribusi didalam kegiatan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan judul : **“Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota Di Sumatera Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah penduduk, PDRB perkapita, jumlah pelanggan listrik rumah tangga dan jumlah kamar hotel berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota di Sumatera Barat?
2. Apakah jumlah penduduk, PDRB perkapita, jumlah pelanggan listrik rumah tangga dan jumlah kamar hotel berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

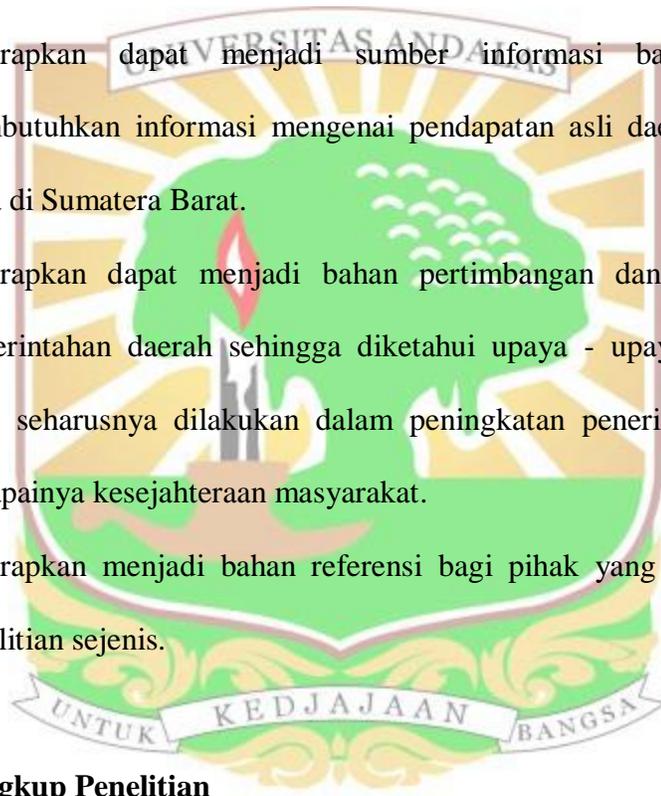
1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, PDRB perkapita, jumlah pelanggan listrik rumah tangga dan jumlah kamar hotel secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten / Kota di Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, PDRB perkapita, jumlah pelanggan listrik rumah tangga dan jumlah kamar hotel secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten / Kota di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pihak yang membutuhkan informasi mengenai pendapatan asli daerah Kabupaten / Kota di Sumatera Barat.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintahan daerah sehingga diketahui upaya - upaya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan dalam peningkatan penerimaan PAD guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.
3. Diharapkan menjadi bahan referensi bagi pihak yang akan melakukan penelitian sejenis.



1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada keseluruhan Kabupaten / Kota yang berada dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan regresi data panel untuk mengkaji pengaruh jumlah penduduk, PDRB perkapita, jumlah pelanggan listrik rumah tangga dan jumlah kamar hotel terhadap pendapatan asli daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri dari enam bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi landasan teori dan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan otonomi daerah, pendapatan asli daerah, jumlah penduduk, PDRB perkapita, jumlah pelanggan listrik rumah tangga dan jumlah kamar hotel, baik berupa teori maupun berupa penelitian empiris.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metodologi yang akan digunakan dalam penelitian, terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM EDJAJAN BANGSA

Bab ini menerangkan tentang gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.